

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap IPM di Provinsi NTB dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Mirzaria Martina¹, M Irwan², Siti Fatimah³

¹⁻³Universitas Mataram

Info Artikel

Article history:

Received April, 2025

Revised April, 2025

Accepted April, 2025

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keywords:

Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Capital Expenditure, and Human Development Index (HDI).

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi satu sama lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan asosiatif. Untuk estimasi, metode Ordinary Least Square (OLS) digunakan, yang dapat diakses melalui program Eviews 12. Perhitungan yang dilakukan termasuk analisis data panel dengan menggunakan Uji Pemilihan Model, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, Analisis Jalur, dan Uji Sobel. Hasil penelitian pada substruktural I menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sementara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak negatif dan tidak signifikan. Hasil perhitungan simultan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, dan DAK memberikan dampak sebesar 61,63% terhadap Belanja Modal. Pada substruktural II, variabel PAD, DAU, dan DAK memberikan dampak positif dan signifikan secara langsung terhadap IPM, sementara variabel Dana Alokasi Umum (DAK) memberikan dampak negatif sebesar 96,99% terhadap IPM. Hasil perhitungan simultan juga menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan DAK.

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund affect each other in West Nusa Tenggara Province, with capital expenditure as an intervening variable. This quantitative research uses an associative approach. For estimation, the Ordinary Least Square (OLS) method is used, which can be accessed through the Eviews 12 program. The calculations carried out included panel data analysis using the Model Selection Test, Classical Assumption Test, Hypothesis Test, Path Analysis, and Sobel Test. The results of the study in substructural I show that the variables of the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) have a positive and significant impact on Capital Expenditure, while the variable of Regional Original Revenue (PAD) has a negative and insignificant impact. The results of the simultaneous calculation show that the variables of Regional Original Revenue (PAD), DAU, and DAK have an impact of 61.63% on Capital Expenditure. In substructural II, the variables PAD, DAU, and DAK have a positive and significant impact directly on HDI, while the General Allocation Fund (DAK) variable has a negative impact of 96.99% on HDI. The results of the simultaneous calculation also show that the variables PAD, DAU, and DAK.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Mirzaria Martina

Institution: Universitas Mataram

Email: mirzariamartina@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara/wilayah. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum di dalamnya tujuan bernegara yakni “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Proses yang bertujuan untuk memberi orang pilihan yang luas, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, sehingga mereka dapat memenuhi standar hidup yang layak disebut pembangunan manusia (Karyono, 2020). Hanya apabila masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, seperti kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak, pembangunan manusia dapat dianggap berhasil (Nashshar & Mulyana, 2022). Menurut Nashar & Mulyana, (2022) kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia adalah tidak meratanya pembangunan antardaerah di Indonesia, yang di mana pembangunan di Indonesia masih bersifat Jawa-sentris. Pembangunan yang masih bersifat Jawa sentris menyebabkan beberapa provinsi di Indonesia memiliki tingkat IPM yang rendah. Salah satu Provinsi di Indonesia yang menduduki peringkat bawah dan memerlukan perhatian dalam capaian IPM adalah Provinsi NTB.

IPM di Provinsi NTB secara nasional menduduki peringkat ke 26 dari 34 provinsi atau masuk ke dalam peringkat 6 terendah dari bawah setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat. Pembangunan manusia menurut standar *United Nations Development Programme* (UNDP) terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-69 kategori sedang. NTB terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota yang dimana IPM rata-ratanya masuk ke dalam kategori sedang seperti yang tertera pada table 1.1 berikut ini :

Tabel 1. IPM Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2013-2022

No.	TAHUN	IPM NTB	KATEGORI
1	2013	63,76	SEDANG
2	2014	64,31	SEDANG
3	2015	65,19	SEDANG
4	2016	65,81	SEDANG
5	2017	66,58	SEDANG
6	2018	67,3	SEDANG
7	2019	68,14	SEDANG
8	2020	68,25	SEDANG
9	2021	68,65	SEDANG
10	2022	69,46	SEDANG

Sumber : Badan Pusat Statistik NTB

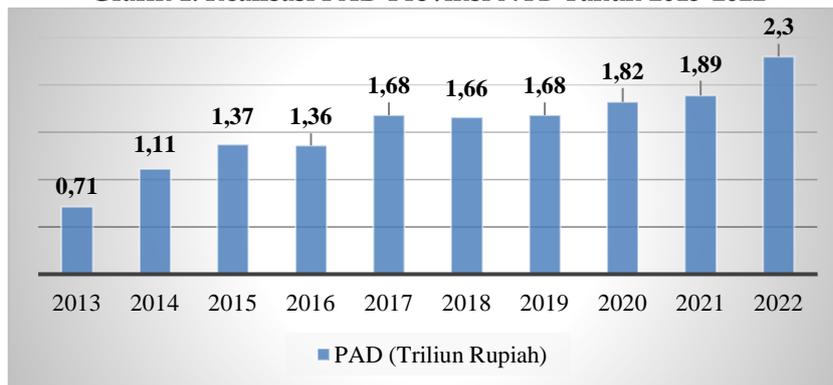
Untuk mengatasi perbedaan dalam pembangunan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang ini untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di bawah kerangka NKRI.

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan nasional melalui pembangunan daerah dan untuk memastikan bahwa dampak pembangunan tersebut didistribusikan secara adil dan merata di seluruh masyarakat. Capaian IPM pada Provinsi NTB secara umum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari komponen seperti Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik. Pencapaian ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencapai pemerataan pembangunan.

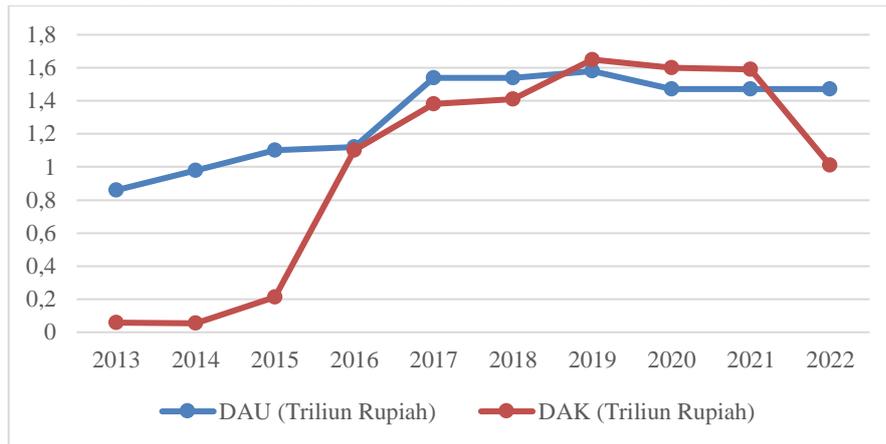
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subagia & Utama, (2022) Hubungan antara PAD dengan IPM didasarkan pada teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa perekonomian akan meningkat apabila sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang kemudian akan mempengaruhi peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor publik sehingga akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PAD merupakan indikator yang kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah di sektor publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun PAD pada Provinsi NTB terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut adalah grafik yang menunjukkan data PAD Provinsi NTB Tahun 2013-2022 :

Grafik 1. Realisasi PAD Provinsi NTB Tahun 2013-2022



Mengingat potensi sumber daya yang berbeda antar daerah, tidak semua daerah memiliki PAD yang cukup untuk mendanai seluruh kebutuhan fiskalnya. Karena itu, pemerintah pusat mengalokasikan uang ke daerah melalui dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini dapat membantu daerah mencapai pemerataan pembangunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan manusia. Selaku daerah otonom, Provinsi NTB berhak atas pengelolaan keuangan sepenuhnya atas dana perimbangan sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mereduksi kesenjangan fiskal. Berikut adalah grafik yang menampilkan besaran DAU dan DAK Provinsi NTB:

Grafik 2. DAU dan DAK Provinsi NTB Tahun 2013-2022



Dana alokasi yang diterima Provinsi NTB diharapkan dapat fokus terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan publik serta pembangunan manusia. Maka, alokasi dana transfer tersebut harus di arahkan untuk direalisasikan dalam bentuk belanja daerah yang berkualitas. Salah satu jenis belanja daerah yang terkait langsung dengan penyediaan layanan publik kepada masyarakat adalah belanja modal. Tabel 1.2 menunjukkan belanja modal pada Provinsi NTB dari tahun 2013-2022. Berikut adalah data belanja modal Provinsi NTB :

Tabel 2. Realisasi Belanja Modal Provinsi NTB Tahun 2013-2022

No.	TAHUN	REALISASI BELANJA MODAL NTB (ribu Rupiah)
1	2013	450.280.000
2	2014	422.797.430
3	2015	834.584.079
4	2016	696.681.646
5	2017	1.153.481.273
6	2018	891.887.046
7	2019	678.168.063
8	2020	608.297.481
9	2021	771.280.939
10	2022	1.313.667.767

Sumber : Badan Pusat Statistik NTB

Rasio belanja modal pemerintah daerah rata-rata nasional adalah 22,48% dari tahun 2015 hingga 2019 (Nashshar & Mulyana, 2022). Target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 untuk mencapai 30% dari belanja daerah dalam APBD masih jauh di bawah tingkat ini.

Studi menunjukkan hubungan antara PAD, DAU, dan DAK dengan IPM dengan belanja modal sebagai variabel intervensi. Melgiana et al. (2020) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia sangat dibantu oleh Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum dan Khusus tidak membantu Indeks Pembangunan Manusia, tetapi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus sangat membantu Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian lain (Januario Moises Boling, Gaguk Apriyanto, 2023) menemukan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Modal, sementara DAK tidak. Dalam substruktur 2, hasil menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal berpengaruh secara langsung terhadap IPM. Ada beberapa masalah, seperti bagaimana PAD, DAU, dan DAK berfungsi di Provinsi NTB.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi Fiskal

Untuk mencapai setidaknya dua tujuan utama, desentralisasi fiskal dilakukan. Ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan fiskal baik secara horizontal maupun vertikal (Simón-Cosano, 2013). Pemerataan fiskal vertikal mengacu pada pemerataan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan pemerataan fiskal horizontal berfokus pada keseimbangan antara daerah otonom (Puspita & Hamidi, 2021).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, juga dikenal sebagai PAD, adalah hak pemerintah daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya PAD yang sah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Ambya, 2023).

2.3 Dana Alokasi Umum

Menurut Kuncoro (2014: 63), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah hibah blok yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota. Tujuannya adalah untuk mengisi celah antara kebutuhan fiskal dan kapasitas suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU harus sekurang-kurangnya 26 persen (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

2.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan sesuai dengan prioritas nasional menurut Pasal 1 Ayat 21 UU No.33 Tahun 2004 (RI, 2022).

2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran keberhasilan pembangunan manusia di bidang tertentu yang menunjukkan tingkat keberhasilan ini. IPM dihitung dari komponen dasar kualitas hidup manusia, seperti standar kehidupan yang layak, usia yang panjang, dan kesehatan. IPM dihitung secara komposit dan digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia suatu negara (Efendi, B et al., 2024).

2.6 Belanja Modal

Belanja modal pemerintah daerah adalah belanja yang digunakan untuk membeli aset tetap berwujud seperti tanah, mesin, peralatan kantor, dan pembangunan aset tetap berwujud seperti gedung, jalan, saluran irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk membantu operasi pemerintah (Perdana, 2019).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data panel dikumpulkan dari tahun 2013 hingga 2022. Studi ini menerapkan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian ini berasal dari laporan realisasi anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Data IPM dan APBD diperoleh melalui portal data APBD DJPK Kementerian Keuangan, serta lembaga resmi Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Ada seratus observasi total dalam penelitian ini.

3.2 Uji Pemilihan Model

Menurut Gujarati dan Porter (2012:360) pemilihan model atau teknik estimasi untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi dapat digunakan tiga pengujian yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji Chow memilih model Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) yang akan digunakan, uji Hausman memilih FEM atau Random Effect Model (REM), dan uji Lagrange Multiplier memilih CEM dan REM.

3.3 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang dilakukan dalam 2 substruktural, yakni substruktural I dan substruktural II dengan menggunakan program aplikasi Eviews 12.

Model regresi dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$LOGBM_{i,t} = \alpha + \beta_1 LOGPAD_{i,t} + \beta_2 LOGDAU_{i,t} + \beta_3 LOGDAK_{i,t} + e.....(1)$$

$$IPM_{i,t} = \alpha + \beta_1 LOGPAD_{i,t} + \beta_2 LOGDAU_{i,t} + \beta_3 LOGDAK_{i,t} + \beta_4 LOGBM_{i,t} + e....(2)$$

Keterangan :

- i : sampel kabupaten/kota
- t : sampel tahun
- α : konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$: koefisien regresi
- LOGBM : belanja modal (transformasi *log*)
- LOGPAD : pendapatan asli daerah (transformasi *log*)
- LOGDAU : dana alokasi umum (transformasi *log*)
- LOGDAK : dana alokasi khusus (transformasi *log*)
- IPM : indeks pembangunan manusia
- e : error term

3.4 Uji Asumsi Klasik

Data panel memiliki keunggulan bahwa implikasi dalam mengolah data menggunakan data panel tidak perlu melakukan uji normalitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan teori *Central Limit Theorem*, uji normalitas hanya perlu dilakukan apabila ukuran sampel yang digunakan kecil atau terbatas. Dengan kata lain, data berada dibawah 100 observasi (Gujarati & Porter, 2009). Uji autokorelasi tidak dilakukan karena pengujian ini hanya dilakukan pada data *time series*, jika dilakukan selain pada data *time series* (*cross section* atau data panel) akan sia-sia karena data panel memiliki sifat *cross section* yang lebih dominan (Basuki & Prawoto, 2015). Berdasarkan teori yang digunakan, maka dalam penelitian ini uji asumsi klasik hanya menggunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas untuk masing-masing substruktural yakni substruktural I dan substruktural II.

3.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui cara-cara, yakni analisis koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji F), analisis jalur (*path analysis*) dan uji sobel (*sobel test*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Substruktural I

Uji substruktural I dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen yakni PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel intervening yakni Belanja Modal. Berikut adalah tabel hasil regresi data panel untuk substruktural I :

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel Substruktural I

Variabel	Variabel Dependen : (Ln) Belanja Modal		
	CEM	FEM	REM
C	1122,455*** (198,9113)	-1866,035* (1007,015)	945,9822*** (299,3155)
PAD	0,110550** (0,049975)	-0,106857* (0,098338)	0,056049* (0,065141)
DAU	0,245072*** (0,099993)	1,571674*** (0,418856)	0,349560** (0,136146)
DAK	0,211861*** (0,051704)	0,189095*** (0,066512)	0,224227*** (0,051690)
F-stat	37,79770***	14,25500***	26,26333***

Adj. R ²	0,527205	0,616368	0,433606
Chow Test			
cross-section F-stat df (9,87)	3,479133***		
Hausman Test			
cross section random: Chi-Sq stat df 3	11,545705***		

Keterangan : angka dalam () adalah *standard error*, angka tanpa tanda () menunjukkan nilai koefisien, Tanda *** : signifikansi α 1%, ** : signifikansi α 5% , * : signifikansi α 10%.

Sumber : output Eviews 12 (data diolah)

4.1.1. Uji Pemilihan Model Substruktural I

1. Uji Chow

Hasil regresi pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa *p-statistik* F adalah *** yakni sebesar 0,0010 < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan HA diterima sehingga model yang terpilih pada uji chow substruktural I adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Hausman

Pada uji Hausman substruktural I, model *Fixed Effect* (FEM) dipilih, karena *p-statistik* chi square 0,0091 < 0,05, yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4.1. Setelah melakukan 2 pengujian, model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) sehingga tidak perlu melakukan pengujian Lagrange Multiplier.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik Substruktural I

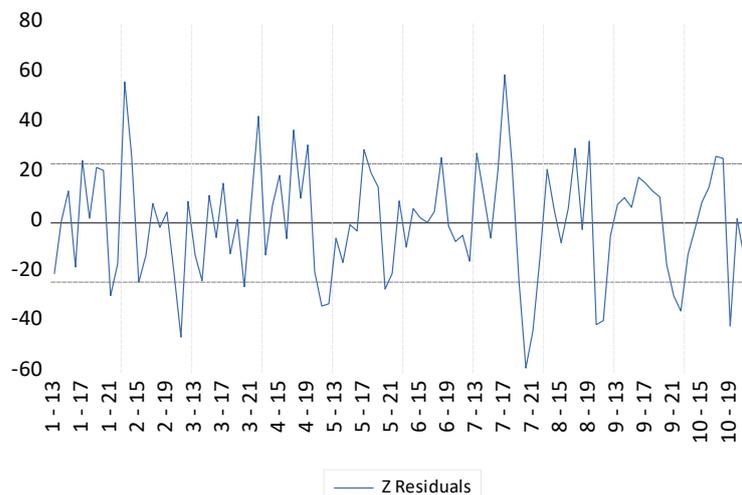
1. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan melihat korelasi antarvariabel dan memperoleh hasil tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel bebas (korelasi antarvariabel bebas di bawah 0,80) pada persamaan regresi substruktural I.

2. Uji Heteroskedastisitas

uji heteroskedastisitas substruktural II menunjukkan *p-value* X1 adalah 0,0091 < 0,05, artinya bahwa model X1 pada data belum terbebas dari heteroskedastisitas. Maka dari itu peneliti menggunakan alternatif lain yaitu uji heteroskedastisitas residual pada grafik 4.1.:

Grafik 3. Heteroskedastisitas Residual Substruktural I



Dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021: 143).

4.1.3. Uji Hipotesis Substruktural I

1. Uji Parsial (uji t)

- a. Menurut tabel 4.1 dengan model FEM yang dipilih, variabel PAD memiliki koefisien - 0,106857* dengan α 10%, yang menunjukkan bahwa Ini menunjukkan bahwa variabel PAD tidak signifikan dan negatif terhadap belanja modal, karena HA ditolak dan H0 diterima.

- b. Tabel 4.1 dengan model FEM yang dipilih menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dengan koefisien 1,571674*** dengan α 1%. Ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima.
- c. Tabel 4.1 dengan model FEM yang dipilih menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dengan angka koefisien 0,189095*** dan α sebesar 1%. Ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima.

2. Uji Simultan (uji F)

Dengan angka probabilitas F-statistic sebesar 1%, H0 ditolak dan HA diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel PAD (X1), DAU (X2), dan DAK (X3) memberikan pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap Belanja Modal Nusa Tenggara Barat (Y). Nilai-nilai ini ditunjukkan dalam tabel 4.1.

3. Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi atau koefisien r-squared yang disesuaikan pada model FEM adalah 0,616368. Hasil analisis regresi data panel substruktural I disajikan dalam tabel 4.1. Ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK dapat menjelaskan 61,63 persen belanja modal Nusa Tenggara Barat dari 2013 hingga 2022, sementara 38,37 persen dari belanja modal tersebut dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau variabel lain di luar model.

4.2. Uji Substruktural II

Uji substruktural II dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen yakni PAD, DAU, dan DAK dan variabel intervening yakni Belanja Modal terhadap variabel dependen yakni IPM. Berikut adalah tabel hasil regresi data panel untuk substruktural II :

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel Substruktural II

Variabel	Variabel Dependen : IPM		
	CEM	FEM	REM
C	184,9623*** (40,82867)	47,09256* (37,33098)	127,5459*** (26,81558)
PAD	0,021560** (0,009113)	0,015672*** (0,003600)	0,017733*** (0,003397)
DAU	-0,068743*** (0,018334)	-0,013964* (0,016416)	-0,049388*** (0,011841)
DAK	0,006638* (0,009968)	0,027544*** (0,002528)	0,028284*** (0,002409)
BM	-0,001069* (0,018154)	-0,020187*** (0,003898)	-0,016911*** (0,003783)
F-stat	4,192392***	246,9486***	53,67282***
Adj. R2	0,114249	0,969967	0,680327
Chow Test			
<i>cross-section F-stat df (9,86)</i>		301.751163***	
Hausman Test			
<i>cross section random: Chi-Sq stat df 4</i>		86,347452***	

Keterangan : angka dalam () adalah *standard error*, angka tanpa tanda () menunjukkan nilai koefisien, Tanda *** : signifikansi α 1%, ** : signifikansi α 5% , * : signifikansi α 10%.

Sumber : output Eviews 12 (data diolah)

4.2.1. Uji Pemilihan Model Substruktural II

1. Uji Chow

Hasil regresi pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa *p-statistik F* adalah *** yakni sebesar 0,0000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan HA diterima sehingga model yang terpilih pada uji chow substruktural II adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

2. Uji Hausman

Model Efek Tetap (FEM) dipilih untuk uji Hausman substruktural II karena *p-statistik chi square* 0,0000 < 0,05, yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Tabel 4.2 menunjukkan hasil regresi.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik Substruktural II

1. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan melihat korelasi antarvariabel dan memperoleh hasil tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel bebas (korelasi antarvariabel bebas di bawah 0,80) pada persamaan regresi substruktural II.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dilakukan pada persamaan regresi substruktural II dan menunjukkan *p-value X1, X2, X3 dan Z* berada > 0,05. Maka dari itu, model substruktural II terbebas dari heteroskedastisitas.

4.2.3. Uji Hipotesis Substruktural II

1. Uji Parsial (uji t)

- a. Pada tabel 4.2, dengan model FEM yang dipilih, dijelaskan bahwa variabel PAD memiliki koefisien 0,015672*** dengan α 1%, yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
- b. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dengan model FEM yang dipilih, variabel DAU memiliki koefisien -0,013964* dengan α 10%, menunjukkan bahwa HA ditolak dan H0 diterima, menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.
- c. Tabel 4.2, dengan model FEM yang dipilih, menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima; koefisien variabel DAK adalah 0,027544***, dengan α sebesar 1%.
- d. Pada tabel 4.2, dengan model FEM yang dipilih, dijelaskan bahwa variabel Belanja Modal memiliki koefisien -0,020187*** dengan α sebesar 1%, menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, dan menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

2. Uji Simultan (uji F)

Nilai pada tabel 4.2. menunjukkan angka probabilitas *F-statistic* dengan α sebesar 1%, maka H0 ditolak dan HA diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan variabel intervening Belanja Modal (Z) berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y) Nusa Tenggara Barat secara simultan.

3. Koefisien Determinasi R²

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel substruktural II pada tabel 4.2. didapatkan koefisien determinasi atau *Adjusted R-squared* sebesar 0,969967. Ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal dapat menyumbang 97% dari IPM Nusa Tenggara Barat pada periode 2013–2022. Sementara itu, 3% dari IPM Nusa Tenggara Barat pada periode 2013–2022 dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau variabel di luar model.

4.3. Hasil Koefisien Jalur

Untuk mengetahui pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dalam penelitian ini maka dibuat tabel hasil koefisien jalur sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Koefisien Jalur

Keterangan Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
------------------	-------------------	-------------------------	----------------

PAD terhadap BM	-0.106857		-0.106857
DAU terhadap BM	1.571674		1.571674
DAK terhadap BM	0.189095		0.189095
PAD terhadap IPM	0.015672	0,002157	0,017829
DAU terhadap IPM	-0.013964	-0,031727	-0,045691
DAK terhadap IPM	0.027544	-0,003817	0,023727
BM terhadap IPM	-0.020187		

Sumber : data diolah penulis

Koefisien determinasi umum (R_m^2) pada model jalur adalah sebesar 0,988487. Artinya, dalam model pengaruh tidak langsung PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM melalui BM, variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, dan DAK secara tidak langsung melalui variabel BM sebesar 98,85%. Sedangkan, 1,15% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Selanjutnya, uji sobel dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh sobel pada tahun 1982 (Herlina & Diputra, 2018). Hasil uji sobel menunjukkan nilai *t-hitung* variabel independen PAD(X1), DAU(X2), dan DAK(X3) secara berurutan sebesar $1,08 < t\text{-tabel } 1,98$, $3,03 > t\text{-tabel } 1,98$, dan $2,20 > t\text{-tabel } 1,98$ maka pada X1 HA ditolak dan H0 diterima yang artinya variabel PAD tidak berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening. Pada X2 dan X3, H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan bahwa variabel DAU dan DAK mempengaruhi IPM melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening tetapi dengan hubungan negatif (-).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal di Provinsi NTB

Hasil uji pengaruh PAD terhadap belanja modal ditunjukkan dalam Tabel 4.1; nilai koefisien variabel independen PAD (X1) sebesar -0,106857* dengan α 10% menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negatif terhadap belanja modal. Meskipun temuan penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Melgiana et al. (2020), temuan Patadang et al. (2021) konsisten. Alasan terkait hal ini dapat dijelaskan dengan penjelasan yang dituturkan oleh kepala bappenda Provinsi NTB yang menyatakan bahwa peningkatan PAD pada Provinsi NTB akan mengakibatkan belanja program dan kegiatan seluruh perangkat daerah mengalami rasionalisasi sehingga dapat seoptimal mungkin membiayai belanja program dan kegiatan seluruh perangkat daerah. Dalam arti, pengalokasian pembiayaan ditujukan kepada belanja daerah. Belanja daerah dapat dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja, dan belanja transfer, sehingga pada saat PAD mengalami peningkatan, pengalokasiannya tidak selalu kepada belanja modal yang dapat menjadi alasan hubungan yang terjadi dalam penelitian ini.

2. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal di Provinsi NTB

Hasil pengujian pengaruh DAU terhadap belanja modal ditunjukkan dalam Tabel 4.1. Dengan koefisien variabel independen DAU (X2) sebesar 1,571674***, dengan α sebesar 1%, H0 ditolak dan HA diterima, menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini mengikuti penelitian Verawaty & Salwa, (2023), meskipun bertentangan dengan Melgiana et al., (2020). Hasil pemeriksaan ini sejalan dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang sumber pendanaan pemerintah daerah dalam APBD, yang menyatakan bahwa DAU digunakan untuk membiayai belanja daerah, salah satunya adalah belanja modal. Selain itu, DAU adalah hibah blok, yang berarti pemerintah daerah memiliki pilihan bebas untuk menggunakannya.

3. Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal di Provinsi NTB

Dengan α sebesar 1%, koefisien variabel independen DAK (X2) sebesar 0,189095***, dengan H0 ditolak dan HA diterima, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Nashshar & Mulyana pada tahun 2022, tetapi bertentangan dengan penelitian Januario Moises Boling dan Gaguk Apriyanto pada tahun 2023. mempertegas tujuan penggunaan DAK, yaitu memberikan prioritas kepada aktivitas fisik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK adalah komponen dari Transfer Ke Daerah (TKD). TKD dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang dilakukan melalui belanja modal.

4. Pengaruh Langsung PAD Terhadap IPM di Provinsi NTB

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian pengaruh langsung PAD terhadap IPM, dengan nilai koefisien variabel independen PAD (X_1) sebesar $0,015672^{***}$ dengan α sebesar 1%, yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_A diterima, yang menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty & Salwa (2023). namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Patadang et al., (2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori menurut Adolf Wagner dalam (Subagia & Utama, 2022) mengenai hubungan antara PAD dengan IPM yang menyatakan bahwa perekonomian akan meningkat apabila sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang kemudian akan mempengaruhi peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor publik sehingga akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dimana PAD digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan maka semakin besar PAD akan semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya sehingga dapat meningkatkan nilai IPM. Dimana dengan meningkatnya PAD, pemerintah dapat seoptimal mungkin membiayai belanja program dan kegiatan seluruh perangkat daerah yang dapat secara langsung meningkatkan IPM di Provinsi NTB.

5. Pengaruh Langsung DAU Terhadap IPM di Provinsi NTB

Hasil pengujian pengaruh langsung DAU terhadap IPM dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menunjukkan hasil nilai koefisien variabel independen DAU (X_2) sebesar $-0,013964^*$ dengan α sebesar 10%, maka H_A ditolak dan H_0 diterima yang artinya variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahira et al., (2022) namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Januario Moises Boling, Gaguk Apriyanto, (2023). Menurut Ambya, (2023) Keberadaan Alokasi Dasar (AD) dalam formula DAU yang dihitung berdasarkan kebutuhan belanja pegawai daerah akan menyebabkan sebagian besar alokasi DAU terserap untuk membiayai belanja pegawai. Sehingga tidak bisa dihindari bahwa adanya AD dalam formula DAU menimbulkan kesan bahwa DAU memang diperuntukkan untuk membayar gaji dapat menjelaskan bahwa DAU belum sepenuhnya mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

6. Pengaruh Langsung DAK Terhadap IPM di Provinsi NTB

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian pengaruh langsung DAK terhadap IPM, dengan nilai koefisien variabel independen DAK (X_3) sebesar $0,027544^{***}$ dengan α sebesar 1%, yang menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Meskipun temuan penelitian bertentangan dengan Nashshar & Mulyana, (2022), hasilnya sejalan dengan Rivianto et al. (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus adalah dana transfer khusus, yang digunakan secara khusus untuk membiayai inisiatif daerah yang menjadi prioritas nasional. DAK dapat berkontribusi pada pembangunan manusia dengan penggunaan yang telah ditetapkan. Ini dapat berkontribusi pada pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Nashshar & Mulyana, 2022).

7. Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM di Provinsi NTB

Hasil pengujian pengaruh langsung Belanja Modal terhadap IPM ditunjukkan dalam Tabel 4.2. Nilai probabilitas variabel intervensi Belanja Modal (Z) adalah $0,0000 < 0,05$ dan koefisien adalah $-0,020187^{***}$ dengan α 1%, yang menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyantari & Dwirandra (2017), tetapi hasilnya bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nashshar & Mulyana (2022). Menurut Nashshar & Mulyana, 2022, tujuan dari belanja pemerintah termasuk belanja modal adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar. Vegirawati (2012) mengatakan bahwa

kegagalan belanja modal untuk meningkatkan IPM mungkin karena pengalokasian belanja modal yang tidak tepat. Belanja modal mungkin terhenti saat proyek sedang berlangsung, yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa indikator PDRB perkapita tidak hanya menjelaskan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencakup indikator kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Fakta bahwa banyak aset, tanah, dan bangunan yang dialokasikan untuk belanja modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhirnya mangkrak dan tidak dimanfaatkan secara optimal menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal belum dilakukan secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan IPM. Selain itu, rasio belanja modal pemerintah daerah rata-rata nasional adalah 22,48% dari tahun 2015 hingga 2019, menurut Nashshar & Mulyana (2022). Rasio belanja modal pemerintah daerah seharusnya mencapai 30% dari total belanja daerah dalam APBD, seperti yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015. Namun, rasio ini masih sangat rendah. Jika dana transfer dialokasikan ke daerah dan tidak digunakan untuk belanja daerah yang efektif, itu tidak akan menguntungkan masyarakat (Nashshar & Mulyana, 2022).

8. Pengaruh Tidak Langsung PAD Terhadap IPM di Provinsi NTB Melalui Belanja Modal

Hasil uji sobel sejalan dengan penelitian Melgiana et al. (2020), tetapi bertentangan dengan Moises Bolaños et al. (2020). Hasilnya menunjukkan bahwa PAD berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal; hasil t-hitung 1,08 lebih rendah dari hasil t-tabel, dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 1,98. Ini menunjukkan bahwa PAD tidak mengintervensi pengaruh PAD terhadap IPM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD dapat meningkatkan IPM secara langsung tanpa mengalokasikan dana modal.

9. Pengaruh Tidak Langsung DAU Terhadap IPM di Provinsi NTB Melalui Belanja Modal

Penelitian Januario Moises Boling dan Gaguk Apriyanto (2023), bagaimanapun, bertentangan dengan hasil uji sobel. Hasil menunjukkan bahwa belanja modal berhasil mengurangi pengaruh DAU terhadap IPM. Hasil hitung t adalah -3,03 (3,03), yang lebih besar dari hasil tabel dengan tingkat signifikansi 0,05, yaitu 1,98. Hasil uji t pada substruktural I menunjukkan bahwa DAU memiliki dampak positif dan signifikan terhadap belanja modal, tetapi hasil uji t pada substruktural II menunjukkan bahwa DAU memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap IPM. Uji sobel pengaruh tidak langsung DAU terhadap IPM ini menunjukkan arah hubungan negatif dan signifikan.

10. Pengaruh Tidak Langsung DAK Terhadap IPM di Provinsi NTB Melalui Belanja Modal

Hasil uji sobel menunjukkan bahwa belanja modal berhasil mengurangi pengaruh DAK terhadap IPM. Hasil t-hitungnya adalah -2,20 (2,20), yang lebih besar dari hasil t-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05, yaitu 1,98. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Nashshar dan Mulyana (2022) menunjukkan bahwa belanja modal berhasil mengintervensi pengaruh DAK terhadap IPM. Hasil uji t pada substruktural I menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, tetapi hasil uji t pada substruktural II menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hubungan antara DAK dan IPM ini tampak negatif, menurut uji sobel pengaruh tidak langsung DAK.

5. KESIMPULAN

- 1) Variabel intervening, belanja modal, dipengaruhi secara signifikan oleh setiap variabel independen. Hasil uji parsial pada substruktural I menunjukkan bahwa PAD berdampak negatif dan tidak signifikan pada belanja modal, sedangkan DAU dan DAK berdampak positif dan signifikan pada belanja modal.
- 2) Secara keseluruhan, uji parsial pada substruktural II dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh langsung variabel independen (PAD, DAU, dan DAK) dan variabel intervening (Belanja Modal) terhadap variabel dependen (IPM). Hasilnya menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel DAU memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.

- 3) Uji sobel yang dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh tidak langsung antara variabel independen (PAD, DAU, dan DAK) terhadap variabel dependen (IPM) melalui variabel intervening (Belanja Modal) ditemukan bahwa belanja modal tidak dapat mengintervensi PAD terhadap IPM. Sebaliknya, belanja modal berhasil mengintervensi DAU dan DAK terhadap IPM, tetapi dengan hubungan negatif. Hasil dari substruktural II mengkonfirmasi bahwa belanja modal

DAFTAR PUSTAKA

- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*.
- Efendi, B; Nasution, Putri, D; Rusiadi; Pratiwi, D. (2024). *TEORI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI* (M. Jannah (ed.)). Tahta Media Group.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (5th EEditi). McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY, 10020.
- Herlina, H., & Diputra, T. T. (2018). Implementasi Rumus Sobel Pada Web Dengan Topik Regresi Linier Menggunakan Variabel Intervening. *Jurnal Algoritma, Logika Dan Komputasi*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.30813/j-alu.v1i1.1106>
- Januario Moises Boling, Gaguk Apriyanto, H. (2023). PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Karyono, Y. et al. 202. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Melgiana, A. C., Rupa, I. W., & Riasning, N. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 45–49. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1543.45-49>
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). INDONESIAIAN TREASURY REVIEW PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI Budi Mulyana. *Indonesian Treasury Review*, 7(03), 255–270.
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(1), 132–149.
- Perdana, A. A. (2019). Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah. *TESIS. Universitas Kristen Satya Wacana*, 2015, 1–32.
- Pradnyantari, P. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada IPM dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 536–564.
- Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). DESENTRALISASI FISKAL Dua Dekade Implementasi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–289.
- RI, D. A. K. (2022). *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. 1–56.
- Riviando, A., Agustin, H., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <http://jea.ppp.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Simón-Cosano, P. (2013). The Challenge of Local Government Size: Theoretical Perspectives, International Experience and Policy Reform. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 31(5), 1–2. <https://doi.org/10.1068/c475wr3>
- Subagia, I. G. N. K. A., & Utama, M. S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Ipm Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(12), 1538. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i12.p10>

- Verawaty, & Salwa, S. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SILPA, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Zahira, S. N., Rahyu, A. R., & Fajri, F. N. (2022). Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Realisasi Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 102–111. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.517>
- Vegirawati, Titin. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* Vol. 2 No. 1, Januari 2012 hal: 65-74.
- Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (3 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews*. 1 ed. Madenatera.
- Agus Tri Basuki & Nano Prawoto (2015) 'Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EIEWS)', *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M.P, (2004), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (H.Munandar, trans.Edisi kedelapan), Jakarta , Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Badan Pusat Statistik NTB. IPM Provinsi NTB Tahun 2013-2022
- Badan Pusat Statistik NTB. IPM Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2013-2022
- Badan Pusat Statistik NTB. Statistik Keuangan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2022
- DJPK Kemenkeu. Portal Data APBD Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2013-2022
- DJPK Kemenkeu. Portal Data SIKD Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2013-2022